



IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI KECAMATAN GERIH DAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018

Agus Wiyaka¹⁾, Endang Murti²⁾

^{1,2)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun
Email: a.wiyaka@gmail.com

Abstrak

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diterapkan untuk menggantikan program bantuan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) yang diwujudkan dalam bentuk non tunai dan diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang setiap bulannya diberikan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang/e-warong yang bekerja sama dengan bank. Tujuan khusus penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif strategi penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan secara rinci dalam penelitian ini adalah: 1) Mendiskripsikan Implementasi Program BPNT dalam Perlindungan Sosial di Kabupaten Ngawi Jawa Timur 2) Mengetahui Pelaksanaan Program BPNT dalam Perlindungan Sosial di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Penelitian dilakukan di 18 desa di wilayah Kabupaten Ngawi menggunakan metode *Participatory Action Research* yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan dan Keluarga Penerima Manfaat melalui wawancara mendalam, pemilihan sampel dilakukan melalui pendekatan acak bertingkat. Selain itu, terbukti bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui BPNT sangat memberikan peluang usaha baru bagi pengusaha mikro dan menengah sehingga dapat mendorong pertumbuhan E-warong KUBE yang dikelola oleh penerima BPNT yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu di pedesaan. Sebagian besar penerima menyatakan bahan pangan yang berupa beras dan telur yang diterima berkualitas dan pasokannya terjamin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Karena BPNT termasuk berhasil dalam memperbaiki ketepatan dalam hal jumlah dan waktu penyaluran bantuan, pengurangan antrian, proses pencairan yang lebih cepat, serta pengurangan secara signifikan masalah teknis yang dihadapi dilapangan.

Kata kunci: Pangan, Perlindungan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan

Abstract

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) is applied to replace the Rice for Family Welfare (Rastra) assistance program, which is realized in the form of non-cash and is given to the Beneficiary Families (KPM) which are given monthly through an electronic account mechanism used to purchase foodstuffs at merchants / e-warong in cooperation with banks. The specific objective of this research is expected to be an alternative poverty reduction strategy. The detailed objectives in this study are: 1) Describe the Implementation of the BPNT Program in Social Protection in Ngawi Regency, East Java 2) Knowing the Implementation of the BPNT Program in Social Protection in Ngawi Regency, East Java. The study was conducted in 18 villages in the Ngawi Regency area using the Participatory Action Research method which actively involved all relevant parties and the Recipient Families. Benefits through in-depth interviews, sample selection is done through a stratified random approach. In addition, it is evident that the social assistance provided by the government through BPNT greatly provides new business opportunities for micro and medium entrepreneurs so that it can encourage the growth of KUBE E-warong managed by BPNT recipients which ultimately increases the independence of underprivileged communities in rural areas. Most of the recipients stated that the foodstuffs in the form of rice and eggs that were received were of good quality and that their supplies had been guaranteed according to the set schedule. Because BPNT has been successful in improving accuracy in terms of the amount and



timing of aid distribution, reducing queues, faster disbursement processes, as well as significantly reducing technical problems faced in the field.

Keyword: Food, Social Protection, Poverty Alleviation.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini sedang mengambil langkah-langkah yang efektif agar pelaksanaan BPNT berjalan dengan baik. Caranya, dengan memastikan bahwa data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sudah tepat sasaran, memastikan E-Warong sudah berjalan efektif, dan perlunya sosialisasi serta edukasi sebagai upaya literasi produk perbankan kepada KPM, program BPNT merupakan upaya pemerintah untuk menyangga kualitas hidup masyarakat yang tidak mampu. Secara keseluruhan, bantuan sosial pangan akan diberikan kepada sekitar 15,5 juta KPM dan diberikan dalam bentuk BPNT kepada 1,2 juta KPM dan Bansos Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) kepada 14,3 juta KPM. Perluasan penyaluran BPNT Tahun 2018, akan dilaksanakan dalam 4 tahap; yakni tahap I pada Februari, tahap II pada Maret, tahap III pada Juli, dan tahap IV pada Agustus sehingga total KPM program Bansos pangan adalah sebesar 15,498,936 KPM yang tersebar di 514 Kab/Kota. Namun karena Presiden Jokowi meminta pelaksanaan BPNT dilakukan evaluasi dahulu, maka pada tahun 2018 pelaksanaannya ditunda. Tetapi ada beberapa hal yang patut kita beri perhatian lebih dibandingkan dengan persoalan data penerima. BPNT atau istilah awalnya voucher pangan sangat kental nuansa "free market" yang populer dikenal dengan sebutan "mekanisme pasar". Dua poin yang patut kita perhitungkan adalah harga yang bisa berubah-ubah dan kebebasan memilih jenis beras. Harga keseimbangan atau harga tebus komoditas oleh masyarakat penerima manfaat sangat ditentukan oleh kekuatan penjual dan pembeli sehingga tidak bisa dikontrol. Selain itu, masyarakat miskin/rentan yang selama puluhan tahun menerima raskin, tiba-tiba juga dapat memilih jenis beras

sendiri sesuai selera. Kedua poin di atas inilah yang selalu dibangga-banggakan oleh pemerintah sebagai keunggulan BPNT dibandingkan rastra. Dalam aktifitas ekonomi, permintaan dan penawaran merupakan refleksi dari aktivitas di pasar, antara para calon pembeli dan penjual. Sehingga pertemuannya akan membentuk keseimbangan harga akibat polarisasi yang disebabkan oleh mekanisme pasar. Dengan kata lain, harga keseimbangan dibentuk oleh aktifitas permintaan dan penawaran. Dalam konteks di atas, ketika rastra beralih ke BPNT maka akan ada permintaan baru sekitar 17,8 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan masuk ke pasaran. Sedangkan kuantum beras yang akan diminta sebanyak 2,78 juta ton. Disini artinya, jika jatah mereka Rp 110 ribu/bulan kalikan 12 akan didapat uang Rp. 1.320.000/RTS. Namun, jika kita kalikan dengan 17,8 juta RTS maka angkanya akan menjadi sangat fenomenal Rp 3,7 Triliun. Apabila dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya, pada per Maret 2017 hingga Maret 2018, angka kemiskinan di Indonesia telah turun lebih kurang 1,8 juta jiwa, mengingat pada Maret 2017 angka kemiskinan masih sebesar 27,77 juta orang (10,64%). Prosentase angka kemiskinan sebesar 9,82% per Maret 2018 tersebut, merupakan angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Capaian ini menurut BPS disebabkan antara lain bantuan sosial meningkat 87,6%. Untuk di Kementerian Sosial sendiri, terdapat bansos nontunai Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT dan Rastra.

II. METODE PENELITIAN

Capaian dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), menurut Agus Afandi (2014) penelitian yang melibatkan



secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam capaian dan tahapan penelitian diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan: Tahap ini, peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang hendak diteliti.
2. Merumuskan masalah: Dimana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti. Buatlah secara operasional dan membuat batasan-batasan masalahnya terutama dalam menentukan ruang lingkup masalah yang diteliti.
3. Mengadakan studi pendahuluan: Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Pengetahuan yang diperoleh dari studi pendahuluan sangat berguna untuk menyusun kerangka teoritis tentang pemecahan masalah dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian lapangan. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan studi dokumenter, kepustakaan dan studi lapangan.
4. Menentukan sampel penelitian: Pada tahap ini, ditentukan obyek yang akan diteliti. Keseluruhan obyek yang akan diteliti disebut populasi penelitian. Bila dalam penelitian hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka dalam hal ini cukup menggunakan sampel.
5. Menyusun rencana penelitian: Tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian. Sebagai suatu pola perencanaan harus dapat

mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian.

Lokasi dan Objek Penelitian.

Adapun pengertian objek penelitian menurut Sugiyono (2012:13), “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Lokasi dan objek penelitian di kawasan Kabupaten Ngawi sebagai daerah yang mewakili/mencerminkan masyarakat Jawa Timur bagian barat ditinjau dari aspek masyarakat dengan kultur tradisional dan industri, pertanian dan perkebunan.

Sampel dan Responden Penelitian

Pendapat Gay dan Diehl (1992) ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Pengambilan sampel menggunakan teknik *multi stage sampling*, dan subyek penelitiannya adalah Pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Ngawi Jawa timur, yang diwakili oleh aparat pemerintah dan masyarakat di wilayah Kecamatan Geneng dan Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. Selanjutnya diambil sebagian untuk dijadikan sampel/responden penelitian secara “*Purposive Sampling*”. Pengertian teknik *purposive sampling* menurut Arikunto adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. (Arikunto:2006)

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Juliansyah Noor (2011:138). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara), *observasi* (pengamatan), dan *document* (dokumentasi). Sedangkan



untuk menguji keabsahan data adalah menggunakan Triangulasi sumber data.

Metode Analisis Penelitian.

Metode analisis data menggunakan model interaktif. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman dalam Moleong (2000), menjelaskan bahwa dalam melakukan proses analisis komponen utama yang perlu diperhatikan setelah pengumpulan data adalah:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan-catatan tertulis di lapangan hingga laporan akhir lengkap tersusun.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun agar dapat memberi kemungkinan dapat menarik kesimpulan. Dalam penyajian data ini dilakukan setelah melakukan reduksi data yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan.

Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu berupa intisari dari penyajian data yang merupakan hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program BPNT. Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan program BPNT. Program BPNT ini mampu mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan sebagian

kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan. Skema Program BPNT. Setiap KPM, mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan berupa beras dan telur melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Program BPNT merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Program ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga KPM.

Dari uraian di atas tentunya Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi tidak terlepas dari Keluarga Penerima Manfaat yang sesuai dengan basis data terpadu di kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Persoalan yang muncul apakah Kemiskinan di Kabupaten Ngawi sudah dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu Kemiskinan Absolut, Kemiskinan Relatif, Kemiskinan Struktural, Kemiskinan Kultural. Keempat kemiskinan tersebut oleh peneliti akan diuraikan sehingga dapat diketahui berbagai pihak khususnya aparatur yang menangani BPNT.

1. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang disebabkan oleh besar pendapatan yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ini juga dilihat dari perbandingannya yaitu garis batas kemiskinan (proverty line).
2. Kemiskinan relative adalah kemiskinan yang ditentukan oleh kondisi lingkungannya akibat dari ketimpangan distribusi pendapatan sehingga menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien. Ketimpangan ini didapat dari gini ratio.
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena



adanya ketimpangan dalam struktur ekonomi suatu negara.

4. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, atau kondisi sosial budaya yang membuat masyarakat di daerah tersebut menjadi miskin secara terpaksa.

Dari ke empat kelompok kemiskinan diatas tentunya petugas pendata baik dari kantor Statistik Kabupaten Ngawi dan Perangkat desa di wilayah Kabupaten Ngawi harus jeli dalam memasukan data masyarakat miskin ke dalam data basis terpadu sebagai pedoman dalam pemberian BPNT tersebut. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan. Akan tetapi kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumberdaya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup. Kebijakan BPNT sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sosial melalui program penyelamatan dan perlindungan sosial. Pangan adalah salah satu komoditas strategis bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan sangat besar dibandingkan dengan komoditas lainnya. Beras merupakan salah satu diantara komoditi makanan yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan. Mengingat aspek pentingnya keberhasilan program BPNT bagi upaya mempertahankan ketahanan pangan, maka diperlukan dukungan semua pihak (*stakeholder*) agar dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Namun dari berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran BPNT, selalu mengandung faktor-faktor resistensi terjadinya kesalahan dan bahkan penyimpangan dalam penyaluran BPNT.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil temuan penelitian Model Implementasi BPNT dalam Perlindungan Sosial di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dapat dinilai pelaksanaan program BPNT sepanjang tahun 2018 sebagian besar KPM menyatakan kepuasannya pada proses pelaksanaannya sedangkan pengelola E-warung juga menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut. Dari indikator penelitian menunjukkan bahwa KPM dan E-warung sama-sama merasakan bahwa kegiatan Program BPNT tahun 2018 yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi sangat mudah dimengerti serta nyaman, sehingga baik KPM maupun E-warung merasakan manfaatnya secara positif dari pelaksanaan BPNT yang baru pertama kali dilakukan sebagai pengganti program Keluarga Beras Sejahtera. Penelitian dilakukan di 18 (delapan belas) desa di wilayah Kabupaten Ngawi dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan dan KPM melalui wawancara mendalam serta pemilihan sampel dilakukan melalui pendekatan acak bertingkat. Pada pelaksanaannya ternyata dan terbukti bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui BPNT di Kabupaten Ngawi sangat memberikan peluang usaha baru bagi pengusaha mikro dan menengah sehingga dapat mendorong pertumbuhan E-warung KUBE yang dikelola oleh penerima BPNT yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu di pedesaan. Berdasarkan temuan peneliti bahwa masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Ngawi menyatakan lokasi e-warung cukup terjangkau dengan sebagian besar rumah penerima KPM sehingga memudahkan didalam transaksi penukaran Kartu elektronik dengan bahan pangan yang di sediakan oleh E-warung desa. Sebagian besar KPM menyatakan bahan pangan yang berupa beras dan telur yang



diterima berkualitas dan pasokannya terjamin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Karena BPNT termasuk berhasil dalam memperbaiki ketepatan dalam hal jumlah dan waktu penyaluran bantuan, pengurangan antrian, proses pencairan yang lebih cepat, serta pengurangan secara signifikan masalah teknis yang dihadapi dilapangan. Dilihat sisi E-warong sebagai agen penyalur, diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk memilih pemasok-pemasok bahan pangan dalam hal ini beras dan telur dengan pedagang-pedagang besar ataupun dengan produsen langsung yang dalam hal ini petani atau perusahaan penggilingan padi yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi dalam kerja sama program BPNT, hal ini mereka bisa meningkatkan pendapatan khususnya para petani dan perusahaan penggilingan di Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian juga ditemukan sebagian besar KPM termasuk masyarakat yang baru pertama kali memiliki rekening bank melalui Kartu Keluarga Sejahtera, hal ini menunjukkan fakta bahwa BPNT di Kabupaten Ngawi sangatlah membantu usaha mikro untuk terbiasa dengan pembayaran secara digital, sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat mempercepat dan mendorong upaya dari pemerintah dengan pihak perbankan dengan Gerakan Nasional Non Tunai. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat mendukung program pemerintah dan segenap pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan dalam upaya

perbaikan penyaluran BPNT khususnya di pedesaan, terutama terkait dengan sosialisasi program, mekanisme pencairan dan distribusi bantuan sosial.

REFERENSI

- Afandi, Agus. 2014. *Modul Participatory Action Research (PAR), Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. Surabaya :Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel
- AgusWiyaka, EndangMurti, Journal International Developing Country Studies www.iiste.org ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online) Vol.7, No.9, 2017 *Model of Rastra Program in the Framework of Social Protection of Pre-Prosperous Society in Kendal District, Gerih and Kwadungan of Ngawi Regency*
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Gay, L.R. dan Diehl, P.L. (1992), *Research Methods for Business and Management*, MacMillan Publishing Company, New York
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung : Alfabeta.
- Materi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Maret 2018, Jakarta